



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 46

NOMOR 1, JUNI 2020

DAFTAR ISI

MEMAHAMI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ORANG ASLI PAPUA (OAP) BERDASARKAN PENDEKATAN <i>PEOPLE-CENTERED</i> Gusti Ayu Ketut Surtiari, Haning Romdiati, Luh Kitty Katherina, Dwiyantri Kusumaningrum, & Ari Purwanto Sarwo Prasajo	1-14
KARAKTER ORANG MADURA, NASIONALISME, DAN GLOBALISASI Ardhie Raditya	15-33
DARURAT LITERASI MEMBACA DI KELAS AWAL: TANTANGAN MEMBANGUN SDM BERKUALITAS Lukman Solihin, Indah Pratiwi, Genardi Atmadiredja, & Bakti Utama	34-48
MEMAHAMI GENERASI PASCAMILENIAL: SEBUAH TINJAUAN PRAKTIK PEMBELAJARAN SISWA Diyan Nur Rakhmah W. & Siti Nur Azizah	49-64
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA PADA MINAT WIRAUUSAHA: STUDI KASUS KNPI KOTA SEMARANG Ahmad Zaenal Arifn & Deden Dinar Iskandar	65-79
PENGEMBANGAN MATA PELAJARAN UNTUK MEMPERKUAT LITERASI BUDAYA DAN KEWARGAAN Budiana Setiawan	80-92
RINGKASAN DISERTASI DANCING WITH LEGITIMACY: GLOBALIZATION, EDUCATIONAL DECENTRALIZATION, AND THE STATE IN INDONESIA Irsyad Zamjani	93-108
TINJAUAN BUKU MEMBANGUN KESETARAAN, MENGIKIS KESENJANGAN DAN MEMBUKA PELUANGH: MENGUBAH CARA Pandang GURU DALAM MENDIDIK SISWA YANG BERASAL DARI KELUARGA MISKIN Anggi Afriansyah	109-116
TINJAUAN BUKU DESENTRALISASI RADIKAL: IKHTIAR PENGEMBANGAN WILAYAH IMEKKO SORONG SELATAN Dini Rahmiati	117-123



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 46

NOMOR 1, JUNI 2020

DAFTAR ISI

MEMAHAMI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ORANG ASLI PAPUA (OAP) BERDASARKAN PENDEKATAN <i>PEOPLE-CENTERED</i> Gusti Ayu Ketut Surtiari, Haning Romdiati, Luh Kitty Katherina, Dwiyantri Kusumaningrum, & Ari Purwanto Sarwo Prasajo	1-14
KARAKTER ORANG MADURA, NASIONALISME, DAN GLOBALISASI Ardhie Raditya	15-33
DARURAT LITERASI MEMBACA DI KELAS AWAL: TANTANGAN MEMBANGUN SDM BERKUALITAS Lukman Solihin, Indah Pratiwi, Genardi Atmadiredja, & Bakti Utama	34-48
MEMAHAMI GENERASI PASCAMILENIAL: SEBUAH TINJAUAN PRAKTIK PEMBELAJARAN SISWA Diyana Nur Rakhmah W. & Siti Nur Azizah	49-64
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA PADA MINAT WIRAUUSAHA: STUDI KASUS KNPI KOTA SEMARANG Ahmad Zaenal Arifin & Deden Dinar Iskandar	65-79
PENGEMBANGAN MATA PELAJARAN UNTUK MEMPERKUAT LITERASI BUDAYA DAN KEWARGAAN Budiana Setiawan	80-92
RINGKASAN DISERTASI <i>DANCING WITH LEGITIMACY: GLOBALIZATION, EDUCATIONAL DECENTRALIZATION, AND THE STATE IN INDONESIA</i> Irsyad Zamjani	93-108
TINJAUAN BUKU MEMBANGUN KESETARAAN, MENGIKIS KESENJANGAN DAN MEMBUKA PELUANG: MENGUBAH CARA Pandang GURU DALAM MENDIDIK SISWA YANG BERASAL DARI KELUARGA MISKIN Anggi Afriansyah	109-116
TINJAUAN BUKU DESENTRALISASI RADIKAL: IKHTIAR PENGEMBANGAN WILAYAH IMEKKO SORONG SELATAN Dini Rahmiati	117-123



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 46

NOMOR 1, JUNI 2020

DDC: 331.11

MEMAHAMI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ORANG ASLI PAPUA (OAP) BERDASARKAN PENDEKATAN *PEOPLE-CENTERED*

**Gusti Ayu Ketut Surtiari, Haning Romdiati, Luh Kitty Katherina,
Dwiyanti Kusumaningrum, & Ari Purwanto Sarwo Prasajo**

ABSTRAK

Kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua (OAP) saat ini belum banyak dibahas. Pengukuran yang digunakan selama ini hanya bersumber pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Papua Barat dan Papua merupakan dua provinsi dengan nilai IPM terendah di Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah ukuran tersebut sudah menggambarkan secara utuh kondisi OAP yang memiliki karakter geografis, sosial, dan budaya berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia? Kelemahan pengukuran menggunakan IPM adalah sangat bias pada pertumbuhan ekonomi. Padahal, aspek kognitif dari penduduk juga penting untuk menilai kualitas penduduk. IPM masih mengabaikan aspek subyektif terkait dengan cara pandang penduduk terhadap kehidupan dan lingkungannya. Pada tahun 2016, United Nations for Development Program (UNDP) memperkenalkan ukuran alternatif dengan menekankan pada indikator yang bersifat subyektif seperti penilaian atas kepuasan hidup. Penilaian tersebut digunakan untuk menghargai pilihan-pilihan tertentu atas kebiasaan dan perilaku sehari-hari yang mengacu pada akar budaya setempat. Tulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana pembangunan kualitas sumber daya manusia menurut OAP. Pendekatan yang digunakan dalam analisis adalah *people-centered* untuk menganalisis cara pandang, persepsi diri, dan kepuasan serta kenyamanan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi terpusat, dan observasi lapangan di Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.

Kata kunci: *kualitas sumber daya manusia, Orang Asli Papua (OAP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Sorong, people-centered*

DDC: 302.4

KARAKTER ORANG MADURA, NASIONALISME, DAN GLOBALISASI

Ardhie Raditya

ABSTRAK

Tulisan ini adalah bagian penting bagi peminat studi-studi Madura yang selama ini sebagian besar ditulis dari sudut pandang orang luar Madura, terutama kelompok peneliti dari Barat. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan memproduksi wacana tandingan terhadap tulisan orang luar Madura yang cenderung memosisikan orang Madura sebagai etnis yang keras sekaligus destruktif. Dengan memakai metode imajinasi etnografis terungkap bahwa karakter terhormat orang Madura tidak seperti yang dibayangkan dalam berbagai literatur orang-orang barat atau kolonial. Orang Madura memiliki kontribusi vital bagi pergerakan nasionalisme anti kolonial hingga pembangunan kebudayaan Indonesia pasca kemerdekaan. Spirit nilai-nilai Islami dan kultur menghormati martabat manusia sebagai lokomotif pembangunan karakter luhur orang Madura. Pasca rezim Orde Baru karakter luhur orang Madura mulai terserak. Kelompok Islam intoleran di Madura berusaha memanfaatkan momentum demokrasi di

Indonesia. Mereka menentang segala bentuk produk globalisasi dan kelompok minoritas Cina yang dianggap tidak sesuai dengan agenda politiknya. Kehadiran mereka berpotensi mengancam tidak hanya pembangunan karakter terhormat orang Madura, termasuk juga, keutuhan bangsa Indonesia.

Kata Kunci: karakter Orang Madura, nasionalisme, dan globalisasi

DDC: 306.43

DARURAT LITERASI MEMBACA DI KELAS AWAL: TANTANGAN MEMBANGUN SDM BERKUALITAS

Lukman Solihin, Indah Pratiwi, Genardi Atmadiredja, & Bakti Utama

ABSTRAK

Dalam rangka membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, Indonesia menghadapi masalah rendahnya mutu pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan, khususnya kemampuan literasi membaca di kelas awal sekolah dasar. Padahal siswa yang tidak mampu membaca akan mengalami “efek Matthew” berupa menurunnya motivasi belajar, rendahnya kemampuan menangkap informasi, berpotensi mengulang kelas, bahkan tidak melanjutkan pendidikan (drop out). Artikel ini berusaha mengkaji persoalan tersebut dan mendiskusikan solusinya. Kami menggunakan data lapangan dari beberapa daerah mitra program INOVASI, antara lain Kabupaten Bulungan, Lombok Utara, dan Sumba Timur. Tiga daerah itu tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan kondisi Indonesia secara keseluruhan, melainkan sebagai daerah pinggir dengan problem yang kompleks mulai dari kualitas dan kompetensi guru hingga minimnya sarana dan prasarana belajar. Data dikumpulkan pada pertengahan 2019 melalui wawancara dan diskusi dengan guru, kepala sekolah, pengawas, serta fasilitator daerah pada program INOVASI. Analisis yang kami lakukan menunjukkan terdapat tiga persoalan utama, yaitu rendahnya kompetensi guru, kurikulum yang mengabaikan pelajaran membaca permulaan, dan minimnya sumber daya bacaan. Tiga persoalan ini perlu dipecahkan apabila kita berharap masa depan SDM Indonesia akan lebih berkualitas dan berdaya saing.

Kata kunci: literasi membaca, kelas awal, kompetensi guru, Kurikulum 2013, buku bacaan anak

DDC: 306.43

MEMAHAMI GENERASI PASCAMILENIAL: SEBUAH TINJAUAN PRAKTIK PEMBELAJARAN SISWA

Diyan Nur Rakhmah W. & Siti Nur Azizah

ABSTRAK

Selepas era generasi milenial berakhir, generasi baru mulai bersiap untuk berperan penuh dalam berbagai urusan dalam kehidupan masa depan. Mereka adalah Generasi Z dan Alpha atau Generasi Pasca-Milenial. Generasi ini mulai menyerbu dunia kerja, tetapi tidak banyak pihak yang paham secara utuh bagaimana memperlakukan mereka nantinya dengan didasarkan pada bagaimana mereka nanti bekerja, berinteraksi, dan membangun komunikasi dalam dunianya. Umumnya, generasi pasca-milenial saat ini masih duduk di bangku sekolah, mempersiapkan diri memasuki era masa depan dengan segala tantangannya. Pendidikan sebagai bagian yang tidak terlepas dalam pembangunan, belum sepenuhnya dijalankan dengan mengakomodir kebutuhan generasi tersebut karena tidak selalu dipraktikkan melalui pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan karakteristik generasi tersebut. Pemahaman lebih mendalam tentang karakteristik generasi ini perlu menjadi perhatian banyak pihak agar praktik-praktik pembelajaran di dalam kelas mampu benar-benar menjawab kebutuhan mereka akan belajar. Pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakter generasi tersebut, yaitu identitas yang sulit didefinisikan karena sering berubah-ubah (*Undefined ID*), menyenangkan kehidupan bersama dengan komunitasnya (*Communalholic*), dan bersifat realistis memandang kehidupan (*Realistic*). Kemajuan teknologi dan informasi menjadi salah satu sebab mengapa karakteristik Generasi Pasca-Milenial sangat jauh berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, serta bagaimana mereka menjalankan kehidupannya kelak. Studi kepustakaan terhadap literatur dan publikasi tentang apa dan bagaimana Generasi Pasca-Milenial dipahami menjadi dasar melakukan analisis, sehingga diharapkan mampu memberikan perspektif berbeda tentang bagaimana mempersiapkan mereka menghadapi masa depan melalui instrumen pendidikan. Tulisan ini bertujuan untuk menawarkan gagasan konseptual tentang praktik-praktik pembelajaran di dalam kelas yang didasarkan pada pemahaman tentang karakteristik Generasi Pasca-Milenial.

Kata kunci: Generasi Pasca-milenial, karakteristik, pembelajaran

DDC: 320.5

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA PADA MINAT WIRAUSAHA: STUDI KASUS KNPI KOTA SEMARANG

Ahmad Zaenal Arifin & Deden Dinar Iskandar

ABSTRAK

Pancasila merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kewirausahaan akan mendorong wirausaha baru tumbuh sesuai dengan budaya yang berkembang di Indonesia, yakni sebagai ekonomi kerakyatan yang berciri khas Indonesia. Keberadaan kewirausahaan Pancasila dalam bentuk ekonomi kerakyatan dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru sehingga dapat menjadi solusi dalam mengurangi pengangguran. Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman akan nilai-nilai Pancasila dapat mempengaruhi minat wirausaha di kalangan pemuda, yang diwakili oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif dengan analisis Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Setelah melakukan penyebaran kuesioner kepada 91 pengurus KNPI dan melakukan olah data menggunakan software Smart PLS3 diperoleh temuan bahwa Perceived Implementation of Pancasila mempengaruhi Attitude, Attitude mempengaruhi Entrepreneurial Intention, dan Entrepreneurial Intention mempengaruhi Entrepreneurial Action. Di samping itu, variabel Access juga mempengaruhi Entrepreneurial Action.

Kata kunci: Pancasila, kewirausahaan Pancasila, Theory Planned Behavior

DDC: 306.4

PENGEMBANGAN MATA PELAJARAN UNTUK MEMPERKUAT LITERASI BUDAYA DAN KEWARGAAN

Budiana Setiawan

ABSTRAK

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2016 telah mencanangkan Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang dilakukan di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. GLN juga mengusulkan enam literasi dasar, yakni: bahasa, numerasi, sains, digital, finansial, dan budaya dan kewargaan. Dalam hal ini literasi budaya dan kewargaan kurang mendapat perhatian karena dianggap kurang memberikan nilai kompetitif dalam menghadapi persaingan global abad ke-21. Padahal literasi budaya dan kewargaan menjadi landasan bagi terbentuknya lima karakter dasar, yang meliputi: religius, nasionalis, mandiri, integritas, dan gotong royong. Permasalahan yang diangkat adalah mata pelajaran apa sajakah yang dapat meningkatkan kesadaran peserta didik, khususnya di SMP/ sederajat dalam mendukung literasi budaya dan kewargaan? Aspek-aspek apa saja yang dapat disumbangkan dari mata pelajaran tersebut? Kajian ini bersifat kualitatif dengan metode penelitian desk research (kajian literatur). Hasil kajian memperlihatkan bahwa mata pelajaran yang dianggap dapat meningkatkan kesadaran peserta didik, antara lain: IPS, Seni dan Budaya, dan PPKn. Mata pelajaran IPS mendorong peserta didik memiliki kesadaran sosial dan mampu hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk. Seni dan Budaya sebagai pondasi untuk menyelamatkan seni dan budaya bangsa Indonesia yang beragam dalam menghadap era modernitas. PPKn mendorong peserta didik memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.

Kata Kunci: literasi budaya dan kewargaan, lima karakter dasar, mata pelajaran, peserta didik

DDC: 320.6

RINGKASAN DISERTASI DANCING WITH LEGITIMACY: GLOBALIZATION, EDUCATIONAL DECENTRALIZATION, AND THE STATE IN INDONESIA

Irsyad Zamjani

ABSTRAK

Desentralisasi telah menjadi norma global yang mengubah wajah tata kelola pendidikan di banyak negara sejak akhir 1970-an. Indonesia tersapu oleh gelombang ini pada tahun 2001 setelah krisis legitimasi yang parah mengakhiri rezim sentralistik Orde Baru yang berkuasa selama tiga dekade. Menggunakan pisau analisis dari

teori neo-institusionalisme dan mengambil data dari dokumen dan wawancara dengan informan strategis, tesis ini menyelidiki bagaimana legitimasi kelembagaan dari desentralisasi pendidikan dihimpun, dimanipulasi, dan kemudian diperebutkan. Narasi desentralisasi pendidikan di Indonesia pada awalnya dibuat oleh para aktor multilateral dengan semangat supremasi pasar neoliberal. Namun, berlawanan dengan argumen liberal dan kritis yang mengisyaratkan melemahnya negara dan bangkitnya institusi pasar sebagai dampak dari desentralisasi pendidikan, temuan tersebut menunjukkan kenyataan yang agak kontras. Desentralisasi telah memfasilitasi bertumbuhnya negara-negara Weberian di tingkat lokal, yang sama-sama mengklaim legitimasi kelembagaan untuk mengatur pendidikan di daerah dengan caranya masing-masing. Dari studi banding dua pemerintahan kota, Kupang dan Surabaya, tesis ini menunjukkan bagaimana legitimasi otoritas pemerintah pusat terus dipertanyakan di daerah. Terlepas dari tekanan pemerintah pusat melalui penerapan standar nasional, tata kelola pendidikan daerah tetap bertahan dengan model dan praktik yang beragam dan berbeda dari ketentuan pusat. Jadi, alih-alih menjadi basis yang dapat memperkuat legitimasi desentralisasi pendidikan sebagai institusi global, praktik-praktik yang berbeda di ranah lokal tersebut mungkin menjadi dasar bagi adanya suatu delegitimasi. Beberapa negara-bangsa akan memikirkan kembali sikap mereka untuk menyesuaikan diri dengan tekanan global mengenai kebijakan desentralisasi ini jika mereka sadar bahwa kebijakan tersebut berpotensi membawa mereka ke dalam krisis legitimasi yang lain.

Kata kunci: *desentralisasi pendidikan, legitimasi, neo-institusionalisme, tekanan global*

DDC: 306.43

TINJAUAN BUKU

MEMBANGUN KESETARAAN, MENGIKIS KESENJANGAN DAN MEMBUKA PELUANG: MENGUBAH CARA PANDANG GURU DALAM MENDIDIK SISWA YANG BERASAL DARI KELUARGA MISKIN

Anggi Afriansyah

Judul Buku: *Reaching and Teaching Students in Poverty: Strategies for Erasing the Opportunity Gap (Multicultural Education Series)*. Penulis: Paul Gorski (2018). Penerbit: Teachers College Press, New York, 234 Pages; ISBN 978-0-8077-5879-3.

TINJAUAN BUKU

DESENTRALISASI RADIKAL: IKHTIAR PENGEMBANGAN WILAYAH IMEKKO SORONG SELATAN

Dini Rahmiati

Judul Buku: *Desentralisasi Radikal: Ikhtiar Pengembangan Wilayah Imekko Sorong Selatan*. Penulis: Bambang Purwoko, dkk. (2017). Penerbit: Ifada Publishing dan Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama –FISI-POL UGM, Yogyakarta, 170 hlm.



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 46

NOMOR 1, JUNI 2020

DDC: 331.11

UNDERSTANDING THE QUALITY OF INDIGENOUS PAPUAN'S HUMAN RESOURCES BASED ON PEOPLE CENTERED APPROACH

**Gusti Ayu Ketut Surtiari, Haning Romdiati, Luh Kitty Katherina,
Dwiyanti Kusumaningrum, & Ari Purwanto Sarwo Prasojo**

ABSTRACT

The human development of the Indigenous Papuans (OAP) is still under research. The current measurement is merely using the Human Development Index (HDI). Papua and West Papua are the two provinces with the lowest HDI scores in Indonesia. The question is whether the grade of HDI has represented the actual condition of OAP by considering the local context of geographic, social, and culture. The shortcoming of HDI is the domination of economic growth, whereas the cognitive aspect of the people can also reflect the quality of well-being. HDI remains neglecting subjective aspects related to the inhabitants' perspectives about their life and neighbourhood. In 2016, the United Nations for Development Program (UNDP) published a report on capability aspects of human development, highlighting the need to consider subjective indicators such as an assessment of life satisfaction. The assessment is used to respect particular choices of behaviours and practices that are rooted in the local culture. This paper aims to have a deeper understanding regarding human development from the perspective of OAP. This study utilizes a people-centered approach to analyze the perception of OAP on their self-evaluation and perception of well-being development. The data collection was undertaken through in-depth interviews, focus group discussions, and field observations in Tambrau Regency and Sorong Regency, West Papua Province.

Keywords: human development, the Indigenous Papuans (OAP), Tambrau Regency, Sorong Regency, people-centered

DDC: 302.4

THE CHARACTERS OF MADURESE, NATIONALISM, AND GLOBALIZATION

Ardhie Raditya

ABSTRACT

This paper is an essential part for those who are interested in Madurese Studies, which have been mostly written from outsiders' point of views, mainly Western researchers. This paper aims to produce a counter-discourse to the writings of outsiders who tend to position the Madurese as a violent and destructive ethnicity. By utilizing the method of ethnographic imagination, it is shown that the honourable character of the Madurese is unlike what has been imagined in various Western or Colonial literature. The Madurese have a vital contribution to the nationalism of anti-colonial for the development of Indonesian culture after the independence period. The spirit of Islamic values and culture respects human dignity as the locomotive of the development of the noble character of the Madurese. After the New Order regime, the true character of the Madurese begins to scatter. Intolerant Islamic groups in Madura tried to use the momentum of democracy in Indonesia to oppose all forms of globalization products and Chinese minority groups that were considerably not aligned with their political agenda. Their presence

could potentially threaten not only the development of the noble character of the Madurese, but also the integrity of the Indonesian nation.

Keywords: Characters of Madurese, nationalism, and globalization

DDC: 306.43

THE EXIGENCY OF READING-LITERACY IN EARLY GRADE: THE CHALLENGES OF DEVELOPING HUMAN CAPITAL QUALITY

Lukman Solihin, Indah Pratiwi, Genardi Atmadiredja, & Bakti Utama

ABSTRACT

To build human capital quality, Indonesia is facing a problem of low learning quality in various levels of education, particularly reading-literacy in early grades of elementary school. This condition will lead to a severe problem because some students who fail at early learning reading may suffer “Matthew effect” which explains the circumstances where they have a lack of learning motivation, low ability to understand information, potential case of repeating classes, and drop out. This article attempts to study the issue and to discuss probable solutions. We use the field data from several regions, which are partnered with the INOVASI Program, such as Bulungan Regency, North Lombok, and East Sumba. These three regions do not represent Indonesia as a whole but as peripheral areas which have complex problems ranging from teachers’ qualities and competencies to learning infrastructure challenges. Data were collected in the mid-2019 throughout interviews and discussions with teachers, headmasters, supervisors, and regional facilitators joint in the INOVASI Program. Our conducted analysis shows that there are three main problems, which are low competency of teachers, the curriculum that neglects preliminary reading subjects, and lack of reading resources. These problems need to be solved if we aspire to realize a more qualified and competitive human capital for the better future of Indonesia.

Keywords: reading-literacy, elementary school, teachers’ competencies, Curriculum K-13, Children’s reading books

DDC: 306.43

UNDERSTANDING POST-MILLENNIAL GENERATION: A REVIEW OF STUDENT LEARNING PRACTICES

Diyan Nur Rakhmah W. & Siti Nur Azizah

ABSTRACT

After the Millennial Generation era ends, the new generation begins to prepare to play a full role in various things in the future. They are Generation Z and Alpha or so-called Post-Millennial Generation. This generation is starting to invade the working world, but not many people understand how to treat them based on how they will work, interact, and build communication in their future. Generally, the Post-Millennial Generation is still at school. They are students who prepare to enter the future era with all its challenges. Education, as an inseparable part of development, has not fully been implemented to accommodate the needs of this generation because it is not always practised through approaches related to characteristics of the generation. A more in-depth understanding of the characteristics of this generation needs attention so that the practices of learning in the classroom can fully answer their learning needs. Learning can be adapted with the characters of this generation, namely, the identity that is difficult to define their self-identity (Undefined ID), enjoys life together with a community (Communalholic), and realistic with their life (Realistic). The advancement of technology and information is the main reason why the characteristics of the Post-Millennial Generation are so much different from previous generations, and how they will live their lives later. A literature study regarding what and how the Post-Millennial Generation is understood becomes the basis for conducting the analysis. It is expected to provide a different perspective on how to prepare their future through educational instruments. This paper aims to offer conceptual ideas about learning practices in the classroom based on the characteristics of the Post-Millennial Generation.

Keywords: Post-Millennial Generation, characteristics, learning practices

DDC: 320.5

THE IMPLEMENTATION OF PANCASILA VALUES ON ENTREPRENEURS' INTEREST: CASE STUDY ON THE KNPI OF SEMARANG CITY

Ahmad Zaenal Arifin & Deden Dinar Iskandar

ABSTRACT

Pancasila is the foundational philosophy of the Indonesian nation. The implementation of Pancasila values in entrepreneurship will encourage new entrepreneurs to grow up aligned with Indonesian culture which embeds a populist economy characteristic. The existence of Pancasila entrepreneurship in the form of a populist economy can encourage the creation of new jobs, and therefore, it could be a solution to reduce unemployment. This study aims to see the extent to which the understanding of Pancasila's values can affect entrepreneurial interest among young people, represented by Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). This research uses a quantitative method with Structural Equation Modeling - Partial Least Squares (SEM-PLS) analysis. After distributing questionnaires to 91 KNPI administrators and conducting data using Smart PLS3, it is found that the Perceived Implementation of Pancasila influences Attitude, Attitude influences Entrepreneurial Intention, and Entrepreneurial Intention influences Entrepreneurial Action. Besides, the Access variable also influences Entrepreneurial Action.

Keywords: Pancasila, Pancasila entrepreneurship, Theory Planned Behavior

DDC: 306.4

THE DEVELOPMENT OF TEACHING SUBJECTS TO STRENGTHEN CULTURAL AND CIVIC LITERACY

Budiana Setiawan

ABSTRACT

The Ministry of Education and Culture has launched the National Literacy Movement in 2016, which has been implemented in schools, families, and communities. The National Literacy Movement proposes six basic literacies, namely: language, numeracy, science, digital, finance, and culture and citizenship. In this case, cultural and civic literacy receives less attention because it arguably contributes less competitive value in facing the 21st-century global competition. Besides, cultural and citizenship literacy is the foundation for the formulation of five basic characters encompassing religious, nationalist, independent, integrous, and cooperative. This article will examine what subjects which can increase student awareness, especially in junior high school in supporting cultural and civic literacy and what aspects which can be contributed from those subjects. This study uses a qualitative method strengthened by desk research. Results show that subjects that are considered to increase student awareness of five basic characters, including Social Studies, Arts and Culture, and Education for Pancasila and Citizenship. Social Studies encourages students to have social awareness and be able to live together in a pluralistic society. Art and Culture contributes as a foundation to preserve Indonesian's arts and culture in facing the era of modernity. The Education of Pancasila and Citizenship encourages students to understand and execute their rights and obligations as Indonesia's citizens.

Keywords: cultural and citizenship literacy, five basic characters, subjects, students

DDC: 320.6

RINGKASAN DISERTASI

DANCING WITH LEGITIMACY: GLOBALIZATION, EDUCATIONAL DECENTRALIZATION, AND THE STATE IN INDONESIA

Irsyad Zamjani

ABSTRACT

Decentralization has become a global norm that has changed the face of education governance in many countries since the late 1970s. This movement utterly swept up Indonesia in 2001 after the severe legitimacy crisis ended the three-decade-reigning centralist regime of the New Order. Using the analytical concepts of the new institutional theory and drawing upon data from documents and interviews with strategic informants, the thesis

investigates how the institutional legitimacy of educational decentralization was garnered, manipulated, and then contested. The narrative of educational decentralization in Indonesia was initially scripted by multilateral actors with the neoliberal spirit of market supremacy. However, against the liberal and critical arguments that suggest the weakening of the central state or the rise of market institutions as the follow-up of educational decentralization, the findings show a somewhat contrasting reality. Decentralization has facilitated the proliferation of Weberian states in the local district arenas, which equally claim institutional legitimacy for governing the local educational system in their respective ways. From the comparative studies of two local district governments, Kupang and Surabaya, the thesis shows how the legitimacy of the central government authority continues to be challenged in the localities. Despite the central government's pressures for national standards and their enforcement measures, local educational governance survives with different, illegitimate models and practices. Thus, rather than becoming a local basis for reinforcing the legitimating capacity of educational decentralization as a global institution, the different practices might become the local source of delegitimation. Some nation-states would rethink their conformity to the international pressure of decentralization if they were aware that the policy would potentially lead them to another crisis of legitimacy.

Keywords: educational decentralization, global pressure, legitimacy, new institutionalism

DDC: 306.43

TINJAUAN BUKU

MEMBANGUN KESETARAAN, MENGIKIS KESENJANGAN DAN MEMBUKA PELUANGH: MENGUBAH CARA PANDANG GURU DALAM MENDIDIK SISWA YANG BERASAL DARI KELUARGA MISKIN

Anggi Afriansyah

Judul Buku: *Reaching and Teaching Students in Poverty: Strategies for Erasing the Opportunity Gap (Multicultural Education Series)*. Penulis: Paul Gorski (2018). Penerbit: Teachers College Press, New York, 234 Pages; ISBN 978-0-8077-5879-3.

TINJAUAN BUKU

DESENTRALISASI RADIKAL: IKHTIAR PENGEMBANGAN WILAYAH IMEKKO SORONG SELATAN

Dini Rahmiati

Judul Buku: *Desentralisasi Radikal: Ikhtiar Pengembangan Wilayah Imekko Sorong Selatan*. Penulis: Bambang Purwoko, dkk. (2017). Penerbit: Ifada Publishing dan Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama –FISI-POL UGM, Yogyakarta, 170 hlm.

DARURAT LITERASI MEMBACA DI KELAS AWAL: TANTANGAN MEMBANGUN SDM BERKUALITAS

Lukman Solihin¹, Indah Pratiwi², Genardi Atmadiredja³, & Bakti Utama⁴

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan^{1,2,3}

Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta⁴

*E-mail: lukman.adalah@gmail.com¹; ip_indah87@yahoo.com²; ominoreg87@gmail.com³;
baktiutama@gmail.com⁴*

ABSTRACT

To build human capital quality, Indonesia is facing a problem of low learning quality in various levels of education, particularly reading-literacy in early grades of elementary school. This condition will lead to a severe problem because some students who fail at early learning reading may suffer “Matthew effect” which explains the circumstances where they have a lack of learning motivation, low ability to understand information, potential case of repeating classes, and drop out. This article attempts to study the issue and to discuss probable solutions. We use the field data from several regions, which are partnered with the INOVASI Program, such as Bulungan Regency, North Lombok, and East Sumba. These three regions do not represent Indonesia as a whole but as peripheral areas which have complex problems ranging from teachers’ qualities and competencies to learning infrastructure challenges. Data were collected in the mid-2019 throughout interviews and discussions with teachers, headmasters, supervisors, and regional facilitators joint in the INOVASI Program. Our conducted analysis shows that there are three main problems, which are low competency of teachers, the curriculum that neglects preliminary reading subjects, and lack of reading resources. These problems need to be solved if we aspire to realize a more qualified and competitive human capital for the better future of Indonesia.

Keywords: reading-literacy, elementary school, teachers’ competencies, Curriculum K-13, Children’s reading books

ABSTRAK

Dalam rangka membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, Indonesia menghadapi masalah rendahnya mutu pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan, khususnya kemampuan literasi membaca di kelas awal sekolah dasar. Padahal siswa yang tidak mampu membaca akan mengalami “efek Matthew” berupa menurunnya motivasi belajar, rendahnya kemampuan menangkap informasi, berpotensi mengulang kelas, bahkan tidak melanjutkan pendidikan (drop out). Artikel ini berusaha mengkaji persoalan tersebut dan mendiskusikan solusinya. Kami menggunakan data lapangan dari beberapa daerah mitra program INOVASI, antara lain Kabupaten Bulungan, Lombok Utara, dan Sumba Timur. Tiga daerah itu tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan kondisi Indonesia secara keseluruhan, melainkan sebagai daerah pinggiran dengan problem yang kompleks mulai dari kualitas dan kompetensi guru hingga minimnya sarana dan prasarana belajar. Data dikumpulkan pada pertengahan 2019 melalui wawancara dan diskusi dengan guru, kepala sekolah, pengawas, serta fasilitator daerah pada program INOVASI. Analisis yang kami lakukan menunjukkan terdapat tiga persoalan utama, yaitu rendahnya kompetensi guru, kurikulum yang mengabaikan pelajaran membaca permulaan, dan minimnya sumber daya bacaan. Tiga persoalan ini perlu dipecahkan apabila kita berharap masa depan SDM Indonesia akan lebih berkualitas dan berdaya saing.

Kata kunci: literasi membaca, kelas awal, kompetensi guru, Kurikulum 2013, buku bacaan anak

AKSES PENDIDIKAN MULAI MERATA, NAMUN BELUM BERMUTU

Presiden Joko Widodo pada periode kedua pemerintahannya mencanangkan fokus pembangunan pada sumber daya manusia (SDM). Poin pertama dalam Nawacita Kedua adalah

“peningkatan kualitas manusia Indonesia” yang diterjemahkan menjadi agenda pembangunan meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Upaya peningkatan kualitas dan daya saing SDM tersebut salah satunya dilakukan melalui pemerataan layanan pendidikan yang bermutu (*Perpres 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024*).

Fokus pembangunan untuk peningkatan kualitas SDM cukup beralasan. Hal itu karena Indeks daya saing Indonesia sejauh ini tidak beranjak baik. Dalam laporan *The Global Competitiveness Report 2019* disebutkan, Indonesia turun ke posisi 50 dari posisi 45 pada 2018. Skor daya saing Indonesia turun 0,3 poin ke posisi 64,6 dan berada di bawah negara tetangga, antara lain Singapura yang menempati posisi pertama, Malaysia di urutan 27, dan Thailand di urutan 40 (Schwab, 2019). Dalam jangka panjang, daya saing suatu negara sangat bergantung pada *output* dari dunia pendidikan karena lulusan yang baik dipercaya memiliki kompetensi dan akan lebih adaptif terhadap gerak perubahan (World Bank, 2018b).

Indonesia sendiri telah melakukan reformasi di bidang pendidikan sejak 2002, ditandai dengan amandemen UUD '45 yang mengamanatkan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan, menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, serta menyediakan anggaran minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini disusul dengan terbitnya UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di antaranya mengatur wajib belajar 9 tahun, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), desentralisasi kewenangan pendidikan dengan pemerintah daerah, serta UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen yang mengatur kualifikasi dan kompetensi guru. Berbagai kebijakan itu telah meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dari 4 tahun pada 1990 berlipat ganda menjadi 8 tahun pada 2015 (World Bank, 2018c).

Namun, regulasi dan kebijakan yang ada baru sebatas mendorong peningkatan akses pendidikan dan belum mendorong peningkatan mutu pembelajaran, terutama apabila dilihat dari hasil *Programme for International Student Assessment* (PISA) dari tahun 2000 hingga 2018. Analisis terhadap peningkatan anggaran pendidikan dibandingkan dengan capaian PISA 2000 - 2015 ibarat "besar pasak daripada tiang". Besarnya anggaran pendidikan, terutama untuk sertifikasi guru dan Biaya Operasional Sekolah (BOS), belum mampu mendongkrak mutu pembelajaran (Kurniawati, Suryadarma, Bima, dan Yusrina, 2018).

Begitu pula analisis hasil PISA 2018 memperlihatkan simpulan yang kurang lebih serupa. Partisipan dalam PISA sejak 2000 sampai 2018 menunjukkan performa yang cukup baik dalam hal perluasan akses pendidikan. Hal itu terlihat dari meningkatnya angka partisipasi siswa bersekolah dalam survei PISA, dari 39% di tahun 2000 menjadi 85% pada 2018. Namun, perkembangan positif di bidang akses pendidikan, belum diikuti performa yang baik dari sisi mutu pembelajaran. Hasil PISA 2018 menunjukkan, skor untuk kemampuan membaca, matematika, dan sains secara berurutan adalah 371, 379, dan 376. Capaian tersebut berada di bawah rata-rata negara-negara OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*). Khusus untuk membaca, terdapat 70% siswa yang kemampuannya berada di bawah kompetensi minimal (Pusat Penilaian Pendidikan, 2018). Padahal menurut Hanushek dan Woessmann (2011), peningkatan poin yang signifikan dalam tes PISA dalam waktu jangka panjang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Apa yang terjadi pada dunia pendidikan di Indonesia sebetulnya menjadi gejala umum pada negara-negara berkembang, di mana perluasan akses pendidikan tumbuh pesat, namun tidak diikuti dengan kualitas pembelajaran yang memadai. Dalam istilah yang dipopulerkan oleh Lant Pritchett (2013), fenomena ini disebut sebagai "*schooling ain't learning*" (bersekolah tetapi tidak belajar). Bank Dunia dalam laporan bertajuk *World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise* menyebutkan, terdapat empat faktor yang membuat siswa di banyak negara berkembang gagal belajar, yaitu: (1) minimnya kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran, baik karena kurangnya nutrisi sejak kanak, minimnya kondisi kesejahteraan keluarga, maupun kurangnya kemampuan literasi dasar; (2) kurangnya kompetensi dan motivasi guru dalam mengajar; (3) minimnya sumber daya belajar; serta (4) manajemen dan tata kelola pendidikan yang buruk (World Bank, 2018a).

LITERASI MEMBACA RENDAH SEJAK KELAS AWAL

Untuk kasus Indonesia, kesiapan siswa dalam belajar salah satunya ditandai dengan lemahnya penguasaan literasi dasar, utamanya kemampuan membaca di kelas awal Sekolah Dasar (kelas 1, 2, dan 3 SD). Hasil *Early Grade Reading Assessment* (EGRA) untuk mengukur kemampuan membaca siswa SD kelas awal yang dilakukan di 7 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa siswa kelas 2 dan 3 umumnya dapat membaca kata dalam Bahasa Indonesia, namun tidak paham maknanya (ACDP, *Lembar Kerja Desember 2014*). Hasil EGRA ini juga menunjukkan, siswa di Jawa dan Bali dapat membaca dan memahami lebih baik dibandingkan siswa di daerah lain. Sementara siswa dari daerah timur Indonesia membaca dengan tingkat pemahaman paling rendah. Begitu pula, terdapat kesenjangan antara siswa di daerah terpencil dengan mereka yang tinggal di daerah non-terpencil (ACDP, *Lembar Kerja Desember 2014*).

Hasil EGRA di atas sejalan dengan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) yang mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains bagi siswa kelas 4 SD. Hasil Aksi secara nasional menunjukkan, untuk kategori kurang dalam kemampuan matematika sebanyak 77,13%, kurang dalam membaca 46,83%, dan kurang dalam sains 73,61% (Kemdikbud, *Panduan GLN 2017*). Artinya, hampir setengah dari siswa kelas 4 SD memiliki kemampuan di bawah rata-rata dalam membaca. Lemahnya kemampuan membaca itu terus terjadi, sehingga tidak mengherankan apabila hasil PISA menunjukkan lebih dari 55% anak usia 15 tahun buta huruf secara fungsional, yakni dapat membaca teks namun tidak mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut (World Bank, 2018c).

Rendahnya kecakapan membaca di kelas awal ibarat kondisi tengkes (*stunting*) dalam dunia kesehatan. Pada anak dengan kondisi tengkes, periode emas perkembangan otaknya terhambat karena kurangnya asupan nutrisi. Akibatnya, kapasitas intelektual anak tidak berkembang optimal. Begitu pula dengan lemahnya literasi membaca dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan anak dalam mengarungi dunia pendidikan.

Siswa yang tidak mampu membaca dengan baik akan mengalami banyak hambatan dalam belajar.

Stanovich (1986) menyebutnya sebagai “efek Matthew”, yaitu dampak bagi siswa yang tidak bisa membaca dengan baik di kelas awal akan kehilangan motivasi, hanya mampu menyerap sedikit informasi, serta tidak mampu memahami informasi yang kompleks. Akibatnya, siswa bukan hanya gagal belajar, melainkan berpotensi besar mengulang kelas bahkan tidak melanjutkan pendidikan. Sebuah penelitian terhadap pelajar di Amerika Serikat mengungkapkan, para pelajar yang tidak dapat membaca lancar di akhir kelas 3 sekolah dasar memiliki risiko empat kali lebih besar meninggalkan bangku sekolah (*drop out*) tanpa mendapat ijazah dibandingkan mereka yang lancar membaca (Hernandez, 2011).

Kondisi “tengkes” baik secara jasmani maupun karena lemahnya literasi membaca sama-sama menyumbang beban bagi upaya peningkatan SDM yang bermutu dan berdaya saing. Bonus demografi yang digadang-gadang dapat menjadi potensi pertumbuhan dapat menjelma “bencana demografi” apabila secara fisik dan intelektual anak tidak disiapkan dengan baik (*Kompas*, edisi 12/03/2016). Oleh karena itu, persoalan rendahnya kemampuan literasi membaca di kelas awal perlu ditelaah terutama pada proses pembelajaran di dalam kelas, untuk mengenali hambatan-hambatan yang mungkin terjadi, serta merumuskan solusi yang dapat dilakukan guna mengatasi persoalan tersebut.

Artikel ini bertujuan untuk menelaah apa saja persoalan yang membuat literasi membaca di kelas awal rendah serta mendiskusikan upaya untuk mengatasinya. Data yang digunakan berasal dari tiga daerah, yaitu Kabupaten Bulungan di Kalimantan Utara, Lombok Utara di Nusa Tenggara Barat, serta Sumba Timur di Nusa Tenggara Timur. Data dikumpulkan pada medio 2019 melalui serangkaian wawancara dan diskusi dengan guru, kepala sekolah, pengawas, serta fasilitator program INOVASI. Tiga daerah tersebut merupakan mitra program peningkatan literasi dasar yang dilakukan oleh INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia). INOVASI sendiri merupakan program kemitraan Indonesia-Australia yang berjalan sejak 2016

dan fokus pada isu peningkatan literasi dasar di kelas awal di 16 kabupaten/kota, sebagian di antaranya merupakan kawasan 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Tiga daerah yang dibahas dalam artikel ini tidak dimaksudkan sebagai representasi kondisi Indonesia secara keseluruhan, melainkan sebagai daerah pinggiran yang memiliki masalah kompleks di bidang pendidikan. Persoalan rendahnya literasi dasar di kelas awal mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, baik di perkotaan maupun perdesaan. Namun, persoalan ini menjadi lebih pelik di daerah yang memiliki problem kualitas dan kompetensi guru hingga minimnya sarana dan prasarana belajar.

SKETSA PERMASALAHAN LITERASI MEMBACA DI KELAS AWAL

Kualitas pembelajaran dipengaruhi oleh banyak faktor. Studi yang dilakukan oleh Bank Dunia terhadap kondisi pendidikan di kawasan Asia Pasifik memetakan beberapa faktor yang memengaruhi performa pendidikan, yaitu kualitas dan kompetensi guru, kurikulum dan sumber daya belajar, serta kesiapan belajar siswa. Di luar tiga hal itu, manajemen dan tata kelola pendidikan juga merupakan faktor tidak langsung yang turut memengaruhi kualitas pembelajaran (Bank Dunia, 2018b).

Studi yang kami lakukan menemukan kemiripan dengan temuan di atas. Terdapat tiga faktor utama yang menghambat kualitas hasil literasi membaca siswa di kelas awal, yaitu kualitas dan kompetensi guru, kurikulum di kelas awal, serta sumber daya belajar (perpustakaan dan buku bacaan). Hasil telaah dan pengamatan kami di lapangan, ketiga persoalan tersebut berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran membaca di kelas awal sekolah dasar.

Rendahnya Kompetensi Guru di Kelas Awal

Kualitas dan kompetensi guru merupakan salah satu kunci utama guna meningkatkan kualitas pembelajaran (Barber and Mourshed, 2007; Shihab dkk., 2018). Di Indonesia, kuantitas guru SD secara keseluruhan relatif tidak bermasalah

karena telah melebihi jumlah kebutuhan, yaitu terdapat kelebihan guru hingga lebih dari 90 ribu orang (PDSPK, 2016). Namun, jumlah tersebut tidak terdistribusi secara merata. Akibatnya, di beberapa daerah terutama perdesaan dan daerah terpencil, jumlah guru tidak memadai, dan sebaliknya di daerah perkotaan jumlah guru justru melimpah.

Jika dari segi kuantitas jumlah guru SD relatif tidak bermasalah, tidak demikian dengan kualitasnya. Merujuk pada UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen, guru seharusnya memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai gambaran kualitas dan profesionalitas mereka. Dalam hal ini, kualifikasi akademik yang dimaksud yaitu memiliki ijazah S1 atau D-IV, sedangkan kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Secara nasional, baru 80,33% guru SD yang memenuhi kualifikasi akademik yang dipersyaratkan, yaitu memiliki ijazah S1 atau D-IV. Artinya, sekitar 19,66% guru masih memiliki kualifikasi akademik belum layak dan perlu penyeteraan. Selain itu, baru dua provinsi di Indonesia, yaitu Bali dan Bangka Belitung, yang kinerja gurunya dalam kategori pratama, sedangkan 32 provinsi lainnya masih dalam kategori kurang (PDSPK, 2016). Sementara rata-rata hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk guru SD secara nasional ialah 40,14 atau berada di bawah ambang batas kelulusan, yaitu 60.

Gambaran di atas secara umum juga tampak di tiga daerah penelitian. Di Kabupaten Bulungan, guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV mencapai 82,51%; di Lombok Utara 85,62%; dan di Sumba Timur 81,63%. Jumlah guru yang telah berpendidikan tinggi tersebut sayangnya belum memiliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan. Rata-rata hasil UKG guru SD di Kab. Bulungan ialah 49,50; di Lombok Utara 53,33; dan di Sumba Timur 49,33 (<https://npd.kemdikbud.go.id>). Rata-rata hasil UKG di tiga daerah tersebut berada di bawah ambang batas kelulusan, yaitu 60.

Data di atas menunjukkan kontras antara meningkatnya kualifikasi akademik (ijazah S1/D-IV) guru SD dengan kompetensi yang mereka

miliki. Kualifikasi akademik merupakan salah satu syarat yang didorong sejak terbitnya UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen dan PP 74/2008 tentang Guru. Guru dalam jabatan (*existing*) kemudian berbondong-bondong menempuh kuliah jarak jauh untuk memenuhi persyaratan jenjang pendidikan tinggi tersebut. Sayangnya, ijazah S1/D-IV yang sudah diperoleh belum mampu meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional mereka sebagaimana terlihat dari rerata hasil UKG.

Rendahnya kompetensi pedagogi dan profesional guru membawa dampak langsung terhadap kualitas pembelajaran literasi membaca di kelas awal. Kami telah melakukan pengamatan dan wawancara terhadap beberapa guru di tiga lokasi penelitian. Hasilnya, rendahnya mutu pembelajaran ini setidaknya tampak dari tiga hal.

Pertama, guru tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengelola pembelajaran di kelas awal yang menarik dan kreatif. Sebagai contoh, pengelolaan pembelajaran di sekolah-sekolah yang tidak mendapat intervensi dari program INOVASI umumnya dilakukan secara konvensional. Di ruang kelas, hampir tidak ada dekorasi atau hiasan yang dapat bermanfaat meningkatkan keterpaparan siswa pada tulisan. Tidak ada pengaturan tempat duduk yang dapat mempermudah guru memberikan perhatian kepada siswa sesuai kemampuan yang mereka miliki. Proses pembelajaran pun dilakukan melalui metode ceramah yang membuat siswa sering kali tidak fokus pada materi yang diberikan oleh guru (untuk ilustrasi kegiatan belajar lihat gambar 1). Bagi siswa, kegiatan belajar yang demikian jadi membosankan dan melelahkan. Pengamatan ruang kelas yang kami lakukan memperlihatkan beberapa siswa sering kali melamun atau bermain sendiri ketika guru berceramah. Akibatnya, pembelajaran tidak berjalan dengan efektif.

Kedua, minimnya pengetahuan guru untuk mengajarkan literasi dasar secara baik. Penekanan pembelajaran literasi dasar di kelas awal adalah upaya memberikan keterampilan membaca pada anak dalam tahapan paling dasar. Dalam proses ini, para guru idealnya memfokuskan pembelajaran pada beberapa aspek seperti:



Gambar 1. Suasana belajar di sebuah SD di Kabupaten Lombok Utara, NTB.

phonic (membaca berdasarkan bunyi tertentu), kesadaran fonologis, memperkaya kosakata, dan menulis berdasarkan bunyi tertentu (Teale, Whittingham, & Hoffman, 2018). Selain itu, dalam melakukan pembelajaran literasi dasar di kelas awal, para guru hendaknya memperbanyak metode pembacaan cerita (Strickland, 2014), serta menggunakan media konkret dan langsung agar siswa lebih mudah memaknai materi yang disampaikan guru (UNESCO, 2018).

Sayangnya, tidak banyak guru memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengajarkan materi membaca permulaan bagi siswa di kelas awal tersebut. Tidak hanya menerapkan buku paket kurikulum 2013 secara kaku, beberapa guru bahkan tidak menggunakan buku paket tersebut secara tepat sehingga siswa kesulitan untuk menerima materi literasi dasar. Akibatnya, sebagaimana hasil wawancara kami dengan Bupati Sumba Timur, masih banyak siswa yang sampai dengan kelas 3 SD masih belum bisa membaca dan menulis.

Ketiga, guru tidak memiliki sensitivitas dalam mengenali masalah dan membangun solusi yang kontekstual. Dalam mengelola pembelajaran, kami tidak menemukan adanya aktivitas reflektif, baik yang dilakukan guru secara personal maupun kelompok (bersama kepala sekolah/guru lain) untuk mempertanyakan kembali apakah teknik mengajar, materi yang digunakan, serta kelengkapan belajar yang mereka gunakan sudah efektif atau belum. Kelompok Kerja Guru (KKG) yang sebenarnya memiliki potensi untuk meningkatkan kapasitas guru, sering kali hanya

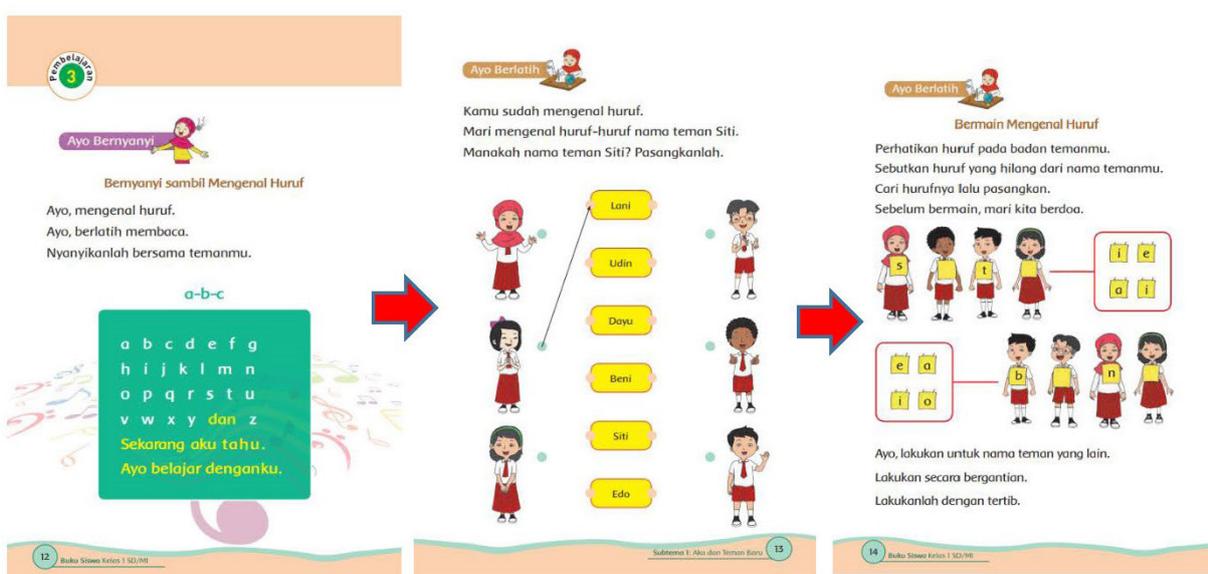
dimanfaatkan para guru untuk membuat soal secara bersama, bukan mendiskusikan persoalan pembelajaran di dalam kelas untuk dicarikan solusinya. Ketidakmampuan siswa dalam mengikuti proses belajar sering kali dipandang bukan karena mutu pembelajaran yang dilakukan oleh guru buruk, melainkan karena siswa dianggap “bodoh”. Dengan cara pandang seperti ini, jangankan menyelesaikan masalah yang dihadapi, kesadaran untuk mengenali permasalahan dalam proses pembelajaran sangatlah minim dimiliki para guru.

Tidak Ada Pelajaran Membaca di Buku Siswa

Kondisi guru yang masih memprihatinkan tersebut berjumpa dengan persoalan lain, yakni tidak adanya materi pelajaran membaca permulaan yang secara khusus dan sistematis tersedia di buku teks pegangan siswa. Sebagian besar guru yang menyandarkan proses pembelajaran hanya pada buku teks mengakibatkan mereka tidak memberikan layanan pembelajaran permulaan yang memadai kepada siswa. Para guru yang kami temui mengeluhkan kondisi bahwa mereka dituntut menuntaskan kurikulum dengan kondisi sebagian siswa belum mampu membaca, namun di sisi lain belum bisa menyelenggarakan pembelajaran membaca permulaan yang cukup karena terkendala materi yang minim di dalam buku teks.

Persepsi para guru di Sumba Timur, Bulungan, dan Lombok Utara mengenai minimnya materi pelajaran membaca permulaan di buku siswa perlu didalami sebagai persoalan kurikulum. Hal itu karena buku teks pelajaran merupakan manifestasi dari Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang ingin dicapai pada kurikulum pembelajaran. Telaah kami terhadap kurikulum sampai pada satu kesimpulan bahwa terdapat ketidaksinambungan antara kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang merupakan jenjang pra-sekolah dengan kurikulum kelas awal SD terutama bila dilihat pada penyajian materi di dalam buku teks.

Apabila mengacu pada Permendikbud 137/2014 tentang Standar Nasional PAUD dan Permendikbud 146/2014 tentang Kurikulum 2013 untuk PAUD tampak jelas bahwa siswa yang mengenyam pendidikan pada jenjang PAUD tidak diharapkan mampu membaca. Dalam Permendikbud 137/2014 tentang Standar Nasional PAUD, khususnya pasal 10 ayat 4 disebutkan mengenai kompetensi pada ranah kognitif yang perlu dikuasai siswa PAUD, meliputi *berpikir simbolik, mencakup kemampuan mengenal, menyebutkan, dan menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, serta mampu merepresentasikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk gambar* (cetak tebal dari kami). Poin tersebut memiliki makna bahwa tingkat capaian PAUD hanya pada mengenal huruf, bukan pada tahapan



Gambar 2. Tahapan pelajaran membaca pada buku tematik: *Diriku*.

membaca sederhana. Sementara itu, kurikulum SD kelas 1 menyebutkan bahwa kompetensi dasar yang harus dilampai oleh siswa kelas 1 SD di antaranya: *melafalkan bunyi vokal dan konsonan baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, pelafalan kosakata dalam bahasa Indonesia yang tepat dibantu dengan bahasa daerah, menggunakan kosakata dalam bahasa Indonesia dengan ejaan yang tepat dalam teks sederhana*. Pada kompetensi dasar tersebut, secara eksplisit menyebutkan bahwa capaian siswa kelas 1 SD adalah dapat membaca dan menulis kosakata sederhana.

Secara sekilas tampak tidak ada masalah antara kurikulum PAUD dan SD kelas awal. Namun, implementasi kurikulum di dalam buku teks pegangan guru dan siswa menunjukkan hal sebaliknya. Di tahap hilir inilah permasalahan ditemukan, yaitu ketika bahan ajar yang dikeluarkan pemerintah tidak menyajikan materi pelajaran membaca permulaan yang cukup.

Pada buku siswa dengan tema *Diriku* yang merupakan buku pegangan pertama untuk diajarkan pada periode awal pembelajaran siswa kelas 1 SD, materi membaca hanya diajarkan pada 3 halaman, yaitu terdapat pada halaman 12, 13, dan 14 (lihat gambar 2). Pada halaman 12, terlihat bahwa pengenalan huruf hanya diajarkan sekilas melalui nyanyian (tanpa petunjuk yang jelas). Pada halaman 13, siswa serta-merta diasumsikan sudah mampu menulis dan membaca (misalnya, menulis nama teman sekelas mereka). Kemudian, pada halaman 14, siswa sudah diberikan permainan acak kata dan menebak kata yang termuat di dalamnya. Pada halaman-halaman selanjutnya, siswa sudah dianggap menguasai materi membaca dan menulis kalimat sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan pembelajaran membaca permulaan hanya difasilitasi dalam ruang yang sangat terbatas sebagaimana tergambar pada tiga halaman tersebut.

Materi kurikulum yang demikian seolah mengabaikan kaidah-kaidah pedagogis tentang proses mengajarkan membaca dan menulis permulaan. Ada banyak metode belajar membaca permulaan yang sangat populer dan biasa ditemukan dalam metode belajar permulaan. Menurut Muhyidin (2015), metode membaca yang jamak dilakukan

setidaknya menggunakan empat metode, yaitu metode abjad (harfiah), metode bunyi, metode suku kata, dan metode kata lembaga. Irdawati dan Darmawan (2015), menambahkan dua metode lainnya, yaitu *spelling methode* (metode eja) dan metode kalimat.

Berdasar pengalaman para guru yang kami wawancarai, siswa membutuhkan waktu setidaknya tiga sampai enam bulan untuk proses belajar membaca permulaan sehingga siswa mampu membaca kalimat sederhana. Lama pembelajaran membaca tergantung pada jumlah murid yang diajar dan daya tangkap siswa dalam menerima pelajaran. Berdasarkan asumsi tersebut, kami menilai bahwa kurikulum yang ada telah mengabaikan perlunya materi khusus pembelajaran membaca permulaan yang sesuai dengan kaidah atau metode yang sudah mapan. Padahal jika siswa tidak diperkenankan mendapat pelajaran membaca permulaan di tingkat PAUD, sudah seharusnya pembelajaran SD kelas awal memberikan ruang tersebut.

Permasalahan tersebut mungkin tidak terlalu tampak bagi siswa yang bermukim di wilayah perkotaan yang relatif memiliki ketersediaan bahan bacaan yang cukup disertai tingkat kesadaran orangtua yang tinggi dalam mendidik anak-anak mereka agar bisa membaca. Namun demikian, pada kawasan lain yang jauh dari akses dan penuh keterbatasan, hal ini akan menjadi masalah yang serius. Akibatnya, siswa yang belum mampu membaca dan menulis akan mengalami kesulitan belajar sehingga dapat menyebabkan angka putus sekolah tiga kali lebih tinggi (ACDP, *Lembar Kerja 2014*).

Tidak adanya materi yang cukup untuk pembelajaran membaca permulaan semakin runyam karena guru tidak sungguh-sungguh membaca pedoman pembelajaran yang tersedia pada buku guru. Sebagaimana kita tahu, buku teks pelajaran yang disediakan oleh Kemdikbud terbagi menjadi dua, yaitu buku teks untuk siswa dan buku pegangan guru yang berfungsi sebagai panduan dalam pembelajaran. Sayangnya, tidak banyak guru yang berupaya membaca dan memahami dengan baik pedoman pembelajaran yang telah tersedia.

Kepala Dinas Provinsi NTB yang kami temui mengatakan bahwa dalam sejumlah inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan dinas pendidikan, terungkap bahwa hanya sedikit guru yang membawa buku referensi ke dalam kelas. Dia menengarai bahwa hal itu disebabkan oleh kemalasan guru untuk membaca buku panduan maupun buku pengayaan. Asumsi tersebut terbukti dari hasil wawancara kami dengan beberapa guru kelas awal. Kami bertanya dan mendalami pemahaman guru mengenai halaman pertama buku teks siswa (lihat gambar 3) yang menurut para guru terlalu banyak teks dan tidak cocok diberikan kepada siswa kelas 1 SD di awal masuk sekolah.



Gambar 3. Halaman Pertama Buku Tematik: *Diriku*

Dalam buku teks siswa dengan tema *Diriku* memang tampak kalimat-kalimat sederhana tertulis dengan judul “Aku dan Teman Baru”. Pada halaman pertama buku ini, guru menilai bahwa kalimat-kalimat tersebut sudah harus dibaca oleh siswa. Padahal pada buku pegangan guru tertulis panduan bahwa metode pembelajaran dipraktikkan (bukan dibaca) oleh siswa dengan bimbingan guru. Di sini tampak bahwa sebagian guru masih

menyelenggarakan pembelajaran tanpa berusaha memahami pedoman pembelajaran yang telah disediakan.

Namun, selain karena sebagian besar guru tidak membaca dan memahami buku pegangan guru dengan baik, kami juga menilai bahwa permasalahan ini juga dipicu oleh tata letak pada buku teks pelajaran siswa yang memang cukup membingungkan. Jika buku teks pelajaran benar-benar disusun dengan mempertimbangkan teknik pembelajaran membaca dan menulis permulaan, kesalahan seperti ini tentunya tidak akan terjadi. Dengan mempertimbangkan kaidah pembelajaran membaca dan menulis permulaan tersebut, halaman awal buku sebaiknya tidak langsung dibuka dengan kalimat-kalimat yang banyak teks, melainkan dimulai dengan pengenalan huruf dan abjad.

Minimnya Buku Bacaan

Proses belajar membaca permulaan memerlukan dukungan berupa tersedianya buku bacaan yang tepat dan sesuai jenjang. Sayangnya, apabila melihat data kebiasaan membaca dari *Statistik Penunjang Pendidikan 2018*, sebagian besar pelajar lebih banyak membaca buku pelajaran sekolah (80,83%) daripada buku pengetahuan (50,97%). Selain itu, kunjungan ke perpustakaan juga sangat minim, yaitu hanya sekitar 13,02% (BPS, 2019).

Gambaran minimnya kunjungan ke perpustakaan dan tingginya angka membaca buku pelajaran memiliki korelasi dengan kondisi perpustakaan sekolah yang kami temui di lapangan. Di lingkungan sekolah, akses membaca paling nyata adalah perpustakaan sekolah. Sayangnya, saat ini tidak semua sekolah memiliki perpustakaan. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemdikbud menunjukkan, pada jenjang SD hanya ada sekitar 68% perpustakaan sekolah. Angka ini akan menyusut lagi jika melihat angka perpustakaan yang dapat digunakan oleh siswa, yakni perpustakaan dalam kondisi baik dan rusak ringan, yaitu hanya sebesar 57% (*Dapodik Kemdikbud, 2019*). Dari data tersebut dapat disimpulkan, banyak siswa SD tidak memiliki akses membaca yang memadai.

Selain aspek kuantitas, aspek kualitas perpustakaan sekolah juga masih belum menggembarakan. Perpustakaan sekolah yang kami kunjungi di tiga daerah penelitian masih kurang representatif sebagai perpustakaan ramah anak karena dua faktor berikut.

Pertama, kondisi perpustakaan dipenuhi oleh buku paket atau buku teks pelajaran, baik yang masih digunakan, maupun buku lama yang menumpuk dan tidak terpakai lagi karena perubahan kurikulum. Kondisi yang demikian membuat perpustakaan lebih mirip seperti “gudang buku bekas”. Hasil wawancara kami dengan para kepala sekolah mendapatkan kesimpulan yang seragam bahwa sekolah tidak berani membuang buku yang tidak terpakai karena khawatir menjadi “temuan” saat dilakukan audit. Akibatnya, dari segi tata ruangan, perpustakaan didominasi oleh buku paket atau buku pelajaran.

Kedua, dari segi koleksi, perpustakaan sekolah yang kami amati memiliki koleksi buku bacaan atau buku pengayaan yang sangat minim. Akibat minimnya koleksi buku bacaan non-pelajaran, siswa hanya meminjam jenis koleksi buku paket yang secara langsung mereka gunakan dalam proses pembelajaran. Jumlah koleksi buku bacaan yang minim juga menjadi alasan banyaknya siswa yang tidak berkunjung atau meminjam buku di perpustakaan sekolah.

Berdasarkan kondisi itu, tidak mengherankan jika minat baca siswa umumnya terarah kepada buku pelajaran. Hasil survei minat baca yang dilakukan INOVASI di Kabupaten Bulungan dan Malinau, Kalimantan Utara, menunjukkan bahwa minat baca siswa cukup tinggi, yaitu sebesar 84,76%, namun buku yang dibaca ialah buku pelajaran. Minat baca yang tinggi tidak diikuti oleh tersedianya buku bacaan, baik di tingkat keluarga maupun di sekolah (INOVASI, 2017a). INOVASI kemudian mempersempit lokus penelitian di Kabupaten Bulungan dengan fokus mengungkap ketersediaan buku bacaan untuk siswa kelas awal. Hasilnya menunjukkan, dari 12.067 buku bacaan di perpustakaan sekolah yang disurvei, yang terdiri dari 4.055 judul buku, hanya 393 judul (9%) yang sesuai untuk siswa kelas awal (INOVASI, 2017a).

Hasil survei INOVASI tersebut terkonfirmasi ketika kami melakukan observasi ke sejumlah sekolah di Kabupaten Bulungan, di mana sebagian besar buku bacaan, terutama yang berasal dari bantuan pemerintah tidak sesuai bagi siswa di kelas awal. Beberapa judul buku yang tertera pada rak buku pengayaan misalnya, “*Cara Berternak Lele*”, “*Tips Menjadi Wirausahawan*”, atau bahkan “*Cara Membina Rumah Tangga*”. Selain itu, buku bacaan yang tersedia di perpustakaan sekolah sebagian besar merupakan buku lama yang telah usang, hanya menampilkan sedikit gambar, serta tampilannya tidak menarik.

Buku anak, terutama untuk siswa di kelas awal, idealnya harus memenuhi kriteria tertentu, misalnya (1) memiliki sampul buku yang menarik/lucu, (2) buku berisi banyak gambar atau ilustrasi, (3) buku tidak terlalu tebal, dan (4) isi cerita buku menarik (Literasinusantara.com, 29 Agustus 2019). Dari segi tampilan, terdapat perbedaan yang signifikan untuk buku bacaan siswa kelas awal dengan kelas tinggi sekolah dasar. Untuk siswa kelas awal, setiap halaman lazimnya didominasi oleh visual/gambar dengan sedikit teks. Teks yang ditampilkan pun tidak lebih dari 8 kata dan tidak lebih dari 3 baris. Praktisi membaca nyaring (*read aloud*) Rossie Setiawan secara khusus memaparkan ciri-ciri buku bacaan yang tepat untuk anak kelas awal sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.

Dengan membandingkan antara kriteria buku yang tepat untuk siswa kelas awal di atas dengan kondisi buku bacaan yang tersedia di perpustakaan sekolah yang kami temui di lapangan, dapat dinyatakan bahwa siswa kelas awal sedang mengalami krisis buku. Hasil telaah kami terhadap persoalan krisis buku bacaan ini mengantarkan pada beberapa simpulan. *Pertama*, manajemen sekolah tidak memahami kebutuhan mendasar buku bacaan untuk mendukung pembelajaran, serta tidak memahami kriteria buku yang tepat dan sesuai bagi siswa kelas awal. Pembelian buku umumnya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan buku teks pelajaran dan kurang memberi perhatian terhadap pengadaan buku bacaan.

Kedua, sebagai kelanjutan dari masalah pertama, sekolah tidak memanfaatkan secara optimal anggaran sekolah untuk pembelian buku

Tabel 3. Ciri buku bacaan anak

Materi/Isi/Konten	Bahasa	Grafika
1. Non-fiksi berupa fakta, konsep, prosedur, dan metakognitif sederhana tentang diri sendiri dan lingkungan sekitar.	1. Pengembangan kosakata yang sering digunakan	1. Ukuran buku A4, A5, dan B5 atau ukuran lain yang proporsional
2. Fiksi bertokoh manusia, kepahlawanan, cerita fantasi dengan alur sederhana	2. Kata-kata dapat berpola dan berima	2. Format buku berisi gambar, proporsi maksimal 50%
3. Bertema hal-hal yang dekat dengan lingkungan sosial pembaca	3. Tanda baca mulai diperkenalkan sesuai dengan keperluan	3. Penempatan gambar sesuai dengan teks
	4. Kalimat sederhana namun beragam	4. Menggunakan huruf tak berkait (sansserif) ukuran 14-16pt
	5. Kalimat terdiri atas 2-8 kata	5. Ilustrasi mendukung isi paragraf
	6. Kalimat-kalimat membentuk paragraf	

Sumber: Roosie Setiawan dalam leaflet INOVASI, “Buku Bacaan untuk Siswa Kelas Awal” (2018).

bacaan bermutu dan tepat bagi siswa. Sekolah sebetulnya memiliki anggaran dari Biaya Operasional Sekolah (BOS) sebesar 20% untuk pembelian buku. Dalam Permendikbud 3/2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler disebutkan, dana untuk pembelian buku terutama untuk memenuhi kebutuhan buku teks utama (buku pegangan siswa, guru, dan kepala sekolah) dan jika sudah terpenuhi, maka dapat digunakan untuk membeli buku teks pendamping (buku pengayaan pelajaran) dan buku bacaan. Sayangnya, sekolah-sekolah pada umumnya hanya berupaya memenuhi kebutuhan buku teks pelajaran dan mengabaikan kebutuhan buku bacaan.

Ketiga, masih kuatnya aroma proyek dalam proses pengadaan buku sehingga tidak mengutamakan kualitas buku. Pengadaan buku untuk koleksi perpustakaan dapat terjebak pada permainan proyek pengadaan buku yang dilakukan oleh distributor buku. Dengan mengunjungi perpustakaan-perpustakaan sekolah, kami menemukan banyak buku bantuan pemerintah yang tidak layak baik dari segi tampilan, kualitas konten, maupun peruntukannya sesuai jenjang pendidikan. Sebagai contoh, buku-buku keterampilan dan kecakapan dalam berwirausaha, bertani, beternak, dan sebagainya yang lebih tepat untuk pembaca dewasa masih dapat kita temukan di banyak perpustakaan sekolah dasar dengan stempel atau penanda sebagai buku bantuan pemerintah.

Keempat, pembelian buku bacaan yang menggunakan anggaran BOS terbatas hanya pada judul-judul buku yang tersedia dalam

Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) yang dapat diakses di <https://siplah.kemdikbud.go.id/>. Situs ini merupakan situs pengadaan milik Kemdikbud yang berisi buku dan nama penerbit. Buku-buku dalam situs tersebut dianggap sudah terverifikasi sehingga aman untuk dibaca oleh siswa. Namun, permasalahan yang timbul dalam kebijakan ini adalah buku yang tersedia dalam aplikasi tersebut masih terbatas terutama untuk kategori buku bacaan bagi siswa kelas awal sehingga sekolah tidak memiliki banyak pilihan.

Selain berupaya mengatur pembelian buku dari segi konten, aplikasi SIPLah juga berkenaan dengan pelaporan penggunaan anggaran. Banyak sekolah tidak berani membeli buku di luar aplikasi tersebut karena khawatir dapat menjadi “temuan” dalam audit penggunaan dana BOS. Dengan demikian, kami menilai kebijakan pengadaan buku seharusnya dievaluasi kembali oleh Kemdikbud dengan memberi keleluasaan dalam pengadaan bahan pustaka untuk memenuhi kebutuhan bacaan siswa.

MERETAS TIGA MASALAH

Kualitas pembelajaran sangat berpengaruh terhadap lulusan yang nantinya menjadi kunci keberhasilan negara dalam menyiapkan SDM yang andal dan berdaya saing. Pembangunan pendidikan di Indonesia relatif telah mampu meluaskan akses pendidikan, namun belum mampu meningkatkan mutu pembelajaran. Salah satu tahap penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan ialah memperbaiki

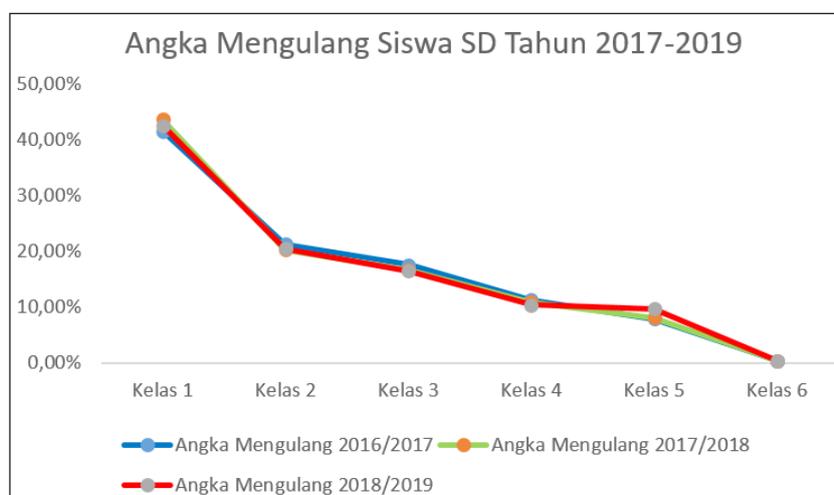
kemampuan literasi membaca siswa di kelas awal yang sayangnya belum berjalan baik. “Efek Matthew” dari payahnya kemampuan literasi membaca tersebut dapat berdampak panjang, tidak hanya pada lemahnya kemampuan siswa dalam menyerap informasi dan pembelajaran, tetapi juga berpengaruh jangka panjang terhadap kualitas SDM di masa depan. Hasil tes PISA menjadi salah satu bukti rendahnya kemampuan literasi membaca di kelas awal yang terus terjadi dari waktu ke waktu dan berdampak terhadap tingginya angka buta huruf fungsional yang diidap oleh warga negara berusia 15 tahun.

Data jumlah siswa yang mengulang kelas di jenjang sekolah dasar dapat menjadi gambaran rendahnya mutu pembelajaran di kelas awal. Data Dapodik menunjukkan bahwa angka mengulang kelas terbesar di jenjang sekolah dasar berada di kelas awal. Bahkan, rerata mengulang kelas di kelas 1 SD mencapai 42,54%. Masih dari sumber data yang sama, selama tiga tahun terakhir angka mengulang kelas di kelas awal justru meningkat sebanyak 0,99% (Dapodik Kemdikbud 2020). Artinya, selama kurun waktu tiga tahun tidak terjadi perubahan yang berarti pada kualitas pembelajaran di kelas awal.

Hasil kajian ini berhasil memetakan tiga faktor utama yang berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran literasi membaca di kelas awal, yaitu rendahnya kompetensi guru, kurikulum yang mengabaikan perlunya materi khusus pelajaran membaca permulaan, serta minimnya sumber daya bacaan.

Pada soal yang pertama, yaitu rendahnya kompetensi guru, posisinya sangat krusial dalam menjamin mutu proses pembelajaran. Peran guru tidak hanya memastikan siswa berhasil dalam belajar, akan tetapi juga membentuk perkembangan pribadi dan minat siswa, serta berbagai kompetensi lainnya yang berkaitan dengan kemampuan untuk belajar sepanjang hayat (Shihab dkk., 2018). Upaya peningkatan kompetensi guru selalu menjadi agenda penting dalam banyak kasus reformasi pendidikan. Studi yang dilakukan oleh Barber dan Mourshed (2007) menyimpulkan bahwa reformasi pendidikan yang berhasil dilakukan oleh negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia terutama difokuskan pada peningkatan kapasitas dan kompetensi guru melalui tiga tahap. *Pertama*, perekrutan guru dilakukan secara selektif sehingga mendapatkan calon guru terbaik. *Kedua*, mengembangkan kompetensi guru melalui pelatihan dan pendampingan oleh instruktur dan tutor dari para guru senior yang profesional. *Ketiga*, memastikan setiap guru memiliki kemampuan untuk mengelola pembelajaran dengan baik di dalam kelas (Barber dan Mourshed, 2007).

Persoalan kompetensi guru memang merupakan urusan yang pelik, namun bukan berarti tidak dapat diatasi. Pemberian tunjangan sertifikasi guru telah meningkatkan kepuasan guru terhadap pendapatan mereka, mengurangi jumlah guru yang mencari pekerjaan sampingan, tetapi belum berdampak terhadap peningkatan hasil belajar siswa (Joppe de Ree, Muralidharan, Pradhan,



Sumber: Diolah dari Dapodik Kemdikbud 2020.

Gambar 4. Grafik Angka Mengulang Kelas Siswa SD

Rogers, 2018). Oleh karena itu, kebijakan peningkatan kapasitas guru tidak dapat dilakukan hanya dengan memberikan insentif semata. Perlu pelatihan dan pendampingan sistematis agar kualitas guru meningkat.

Analisis penulis terhadap program peningkatan literasi dasar di kelas awal yang dilakukan oleh INOVASI menghasilkan kesimpulan bahwa kompetensi guru dapat ditingkatkan melalui pelatihan untuk mengenali masalah, menyusun solusi, mempraktikkan solusi, serta melakukan refleksi dan evaluasi atas proses peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan guru (Pratiwi, Solihin, Atmadiredja, Utama, 2019).

Pertama, guru perlu dilatih untuk mampu mengeksplorasi dan mendefinisikan masalah di sekitar proses pembelajaran yang ditanganinya. Upaya untuk mendefinisikan masalah ini penting guna melihat lebih dekat dan menginsafi banyak kekurangan dari sisi kompetensi dan kreativitas guru dalam mengajar. *Kedua*, dengan memahami masalah yang bersumber dari guru sendiri, mereka dapat menyusun solusi yang paling mungkin untuk meningkatkan mutu pembelajaran. *Ketiga*, mempraktikkan rancangan solusi yang sudah disusun. *Keempat*, refleksi dan evaluasi oleh rekan sejawat guna mendapatkan tanggapan dan masukan atas upaya peningkatan pembelajaran yang telah dilakukan. Pelatihan dan pendampingan oleh sesama guru ini dapat dimaksimalkan melalui forum KKG di setiap gugus pendidikan (Pratiwi, Solihin, Atmadiredja, dan Utama, 2019).

Pada soal kedua, yaitu kurikulum yang tidak menyediakan materi yang cukup untuk pembelajaran membaca permulaan, telah membuat guru berada pada kondisi dilematis. Di satu sisi, guru dituntut menuntaskan materi kurikulum dengan kondisi sebagian siswa belum mampu membaca, namun di sisi lain tidak tersedia materi yang cukup untuk memberikan pembelajaran membaca permulaan bagi siswa.

Guna mengurai sengkabut masalah ini, Kemdikbud melalui Pusat Kurikulum dan Perbukuan perlu mengevaluasi kurikulum dan buku teks pegangan siswa sehingga dapat lebih mengakomodasi kebutuhan siswa untuk belajar membaca permulaan. Teknik mengajarkan membaca permulaan yang telah mapan dapat diadopsi dalam

buku paket agar siswa bisa dipastikan menerima materi belajar membaca sebelum mendapatkan materi lain.

Tidak adanya materi pelajaran membaca yang memadai, diperburuk lagi dengan *persoalan ketiga*, yaitu terbatasnya ketersediaan buku bacaan berjenjang yang layak dan tepat. Ketersediaan akses bahan bacaan merupakan kunci untuk mengembangkan kemampuan membaca serta menjadi rangsangan penting untuk menumbuhkan budaya literasi sejak dini. Rilis *Indeks Aktivitas Literasi Membaca* yang diterbitkan Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan, secara nasional aktivitas literasi membaca masyarakat Indonesia masih berada di level rendah, yaitu di angka 37,32. Nilai tersebut tersusun dari dimensi kecakapan sebesar 75,92; dimensi akses sebesar 23,09; dimensi alternatif sebesar 40,49; dan dimensi budaya sebesar 28,50. Dari angka indeks tersebut tampak bahwa rendahnya dimensi akses terhadap bahan bacaan diikuti oleh rendahnya dimensi budaya (kebiasaan membaca) (Solihin, Utama, Pratiwi, dan Novirina, 2019).

Meskipun demikian, tidak semua sekolah menghadapi permasalahan minimnya buku bacaan. Salah satu praktik baik yang kami lihat di lapangan misalnya dilakukan oleh SDN 10 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dalam menyediakan bahan bacaan yang tepat bagi siswa. Di sekolah ini, kepala sekolah meminta sampel buku kepada penerbit untuk didiskusikan bersama para guru dengan menilai peruntukan usia pembacanya, baru kemudian memutuskan buku mana saja yang layak untuk dibeli dengan anggaran sekolah.

Di tingkat pemerintah daerah, Pemerintah Kab. Bulungan juga merupakan pelopor dalam kebijakan penyediaan buku bacaan untuk koleksi perpustakaan sekolah melalui dana BOSDA (BOS Daerah). Melalui instruksi bupati, setiap sekolah wajib menganggarkan pembelian buku bacaan paling sedikit lima judul dan tiap judul minimal lima eksemplar buku. Artinya, setiap sekolah paling sedikit membeli 25 buku bacaan anak setiap tahunnya. Dilihat dari segi jumlah, mungkin terlihat masih kurang, namun kebijakan ini patut mendapat apresiasi karena secara jelas

mendorong sekolah untuk memberikan perhatian terhadap tersedianya buku bacaan anak yang bermutu.

Upaya yang dilakukan Kab. Bulungan perlu ditiru oleh daerah lain maupun pemerintah pusat. Agar tidak hanya dibelikan buku teks pelajaran, Kemendikbud perlu menetapkan jumlah tertentu pada dana BOS untuk pembelian buku bacaan yang bermutu. Dalam Undang-Undang 43/2007 tentang Perpustakaan, khususnya Pasal 23 angka (6) secara jelas menyebutkan bahwa “Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.” Pengembangan perpustakaan yang dimaksud di antaranya yaitu penambahan koleksi buku bacaan. Amanat undang-undang ini sayangnya belum mendapat perhatian khusus dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Penyebutan secara eksplisit penggunaan dana untuk buku bacaan diharapkan memacu sekolah menyediakan buku bacaan yang cukup bagi siswa. Untuk mendukung langkah ini, evaluasi terhadap kebijakan pengadaan buku melalui aplikasi SIPLah juga perlu dilakukan, yakni dengan memperluas jangkauan buku bacaan bermutu yang dapat dibeli oleh sekolah.

Alternatif lainnya yang dapat ditempuh untuk mendekatkan akses anak terhadap buku bacaan ialah melalui media digital. Usaha ini telah dilakukan oleh *The Asia Foundation* melalui program *Let's Read* dengan sinergi antara sekolah dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). *Asia Foundation* menginisiasi program *Let's Read* untuk menyediakan bahan bacaan yang bermutu dan cuma-cuma yang dapat diakses di situs <https://reader.letsreadasia.org/> atau melalui aplikasi berbasis android sehingga dapat diakses dan dibaca melalui gawai telepon pintar. Buku yang disediakan terdiri dari beragam bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia serta beberapa bahasa daerah seperti Minangkabau, Bali, Jawa, dan Sunda.

Kami menyaksikan beberapa sekolah di Kab. Bulungan telah memanfaatkan layanan *Let's Read* ini. Guru-guru di kelas awal dilatih cara mengunduh konten buku bacaan, kemudian

menampilkan materi buku bacaan itu melalui bantuan proyektor yang disorot ke papan tulis, kemudian membacakannya secara interaktif dengan siswa. Materi buku dan ilustrasi yang menarik yang ditampilkan melalui proyektor membuat siswa sangat antusias.

Selain dapat memanfaatkan buku digital, sinergi dengan perpustakaan komunitas (TBM) juga dapat ditempuh oleh sekolah. Ada kalanya buku-buku bagus yang menarik untuk anak-anak justru tersedia di TBM sehingga anak-anak dapat dengan mudah mendapatkan buku yang relevan bagi mereka. TBM juga bisa menjadi alternatif kegiatan anak sepulang sekolah. Seperti TBM Pelita Hari di tepian Sungai Kayan di Kab. Bulungan yang kami jumpai, di mana banyak siswa SD yang memiliki jadwal khusus untuk berkunjung dan memanfaatkan koleksi taman bacaan untuk kegiatan membaca selepas sekolah. TBM Pelita Hari bahkan memberikan pendampingan belajar membaca khusus bagi anak-anak yang kesulitan membaca di sekolah tanpa dipungut biaya.

PENUTUP

Ada tiga penyebab utama rendahnya kualitas literasi membaca di kelas awal. *Pertama*, rendahnya kompetensi guru di kelas awal. Hal itu berdampak terhadap tiga hal, yaitu: (1) guru tidak mampu mengelola pembelajaran di kelas awal yang menarik dan kreatif, (2) guru tidak mampu mengajarkan literasi dasar secara baik, dan (3) guru tidak memiliki sensitivitas dalam mengenali masalah dan membangun solusi atas permasalahan tersebut.

Kedua, kurikulum di kelas awal tidak memberi ruang yang cukup untuk pelajaran membaca. Selain guru, ujung tombak dari implementasi kurikulum adalah bahan ajar yang berkualitas. Sayangnya, di tengah permasalahan kompetensi guru, bahan ajar yang digunakan di kelas awal juga tidak mampu menghadirkan pembelajaran literasi dasar yang berkualitas. Di sini, permasalahan utamanya adalah buku teks pelajaran yang digunakan di kelas awal tidak dapat memandu siswa langkah demi langkah untuk dapat membaca dan menulis.

Ketiga, terbatasnya ketersediaan buku bacaan. Perpustakaan sekolah merupakan sarana penting dalam menjamin akses siswa terhadap bahan bacaan. Sayangnya, secara statistik hanya 57% perpustakaan SD dalam kondisi baik dan rusak ringan. Dari jumlah yang terbatas itu, sebagian besar koleksi perpustakaan sekolah hanya berupa buku teks pelajaran. Buku non-teks hanya tersedia dalam jumlah terbatas dan ironisnya sering kali tidak sesuai dibaca untuk jenjang sekolah dasar.

Jika persoalan rendahnya kualitas pembelajaran literasi dasar di kelas awal tidak ditangani, akan mengakibatkan rendahnya mutu SDM di kemudian hari. Oleh karenanya, berbagai langkah perlu segera dilakukan untuk mengatasi persoalan ini. Terkait rendahnya kompetensi guru, perbaikan sistem perekrutan guru mendesak dilakukan untuk menjamin guru yang diangkat merupakan guru berkualitas. Untuk meningkatkan kompetensi guru dalam jabatan yang telah bertugas, pelatihan dan pendampingan perlu dilakukan untuk menjamin setiap guru memiliki kemampuan mengelola pembelajaran dengan baik.

Selanjutnya, penyempurnaan kurikulum di kelas awal perlu dilakukan, terutama untuk memberi ruang yang lebih luas dalam pembelajaran membaca dan menulis ketika siswa pertama kali masuk SD. Terakhir, akses siswa terhadap buku bacaan perlu diperluas, di antaranya melalui dukungan dana BOS untuk buku bacaan, pelonggaran pengadaan buku bacaan melalui aplikasi SIPLah, panduan memilih buku anak terutama untuk siswa kelas awal, pemanfaatan platform buku digital, serta kerja sama dengan perpustakaan komunitas. Dengan menjalankan berbagai langkah tersebut, diharapkan kualitas pembelajaran literasi dasar di kelas awal akan lebih meningkat.

PUSTAKA ACUAN

ACDP Indonesia. (2014). *Pentingnya Membaca dan Penilaian di Kelas-kelas Awal*. Lembar Kerja Desember 2014.

Hanushek, E. dan L. Woessmann. (2011). "How Much Do Educational Outcomes Matter in OECD countries?" *Economic Policy*. Vol. 26, No. 67, pp. 427-491.

Hernandez, D. (2011). *Double Jeopardy: How Third-Grade Reading Skills and Poverty Influence High School Graduation*. New York, USA: The Annie E. Casey Foundation.

INOVASI. (2017a). *Analisis Situasi Cepat Partisipatif untuk Mendukung Pembelajaran Provinsi Kalimantan Utara*. Jakarta: INOVASI.

----. (2017b). *Program Baseline Report West Nusa Tenggara*. Jakarta: INOVASI.

----. (2018). "Buku Bacaan untuk Siswa Kelas Awal: Ketersediaan dan Akses terhadap Bacaan Bagi Siswa Kelas Awal di Bulungan dan Malinau, Kalimantan Utara". *Leaflet* berisi ringkasan hasil studi *baseline* program INOVASI di Kalimantan Utara.

----. (2019). *Laporan Baseline Sumba, Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: INOVASI.

Irdawati, Yunidar dan Darmawan. (2015). "Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan dengan Menggunakan Media Gambar Kelas 1 di MIN Buol". *Jurnal Kreatif Tadulako Online*, Vol. 5 No. 4.

Joppe de Ree, Karthik Muralidharan, Menno Pradhan, Halsey Rogers. (2018). "Double for Nothing? Experimental Evidence on an Unconditional Teacher Salary Increase in Indonesia". *The Quarterly Journal of Economics*, Volume 133, Issue 2, May 2018, Pages 993-1039.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Data Uji Kompetensi Guru". Diakses 15 Mei 2020 dari <https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=ukg>.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Data Kualifikasi Guru 2019". Diakses 15 Mei 2020 dari <https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=kualifikasi&tahun=2018>.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Diriku: Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Buku Peserta Didik SD/MI Kelas 1*. Jakarta: Kemdikbud.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Uji Kompetensi Guru (UKG) Bagi Guru yang Belum Mengikuti Sertifikasi Pendidik". Bahan paparan diunduh 15 Mei 2020 dari: https://file-p4ttkplb.kemdikbud.go.id/_UJI_KOMPETENSI_GURU/REKAP_HASIL_UKG/UKG_2014.pdf

Klaus Schwab (Ed.). (2019). *The Global Competitiveness Report 2019*. World Economic Forum.

Kompas. "Bencana Demografi Jadi Ancaman", dalam *Kompas* cetak, edisi 12 Maret 2016.

Muhyidin, Asep. (2015). *Pembelajaran Membaca dan Menulis Permulaan Bahasa Indonesia di Kelas Awal*. Banten: Universitas Ageng Tirtayara

- Peraturan Presiden Nomor 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024, Lampiran 1 “Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024”.
- Pratiwi, Indah, Lukman Solihin, Genardi Atmadiredja, Bakti Utama. (2019). *Ringkasan Eksekutif: Praktik Baik Peningkatan Kemampuan Siswa SD di Kelas Awal Literasi Dasar*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pritchett, Lant. (2013). *The Rebirth of Education: Schooling Ain't Learning*. Washington, DC: Center for Global Development; Baltimore: Brookings Institution Press.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Sumber Daya Manusia Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015/2016*. Jakarta: PDSPPK, Kemendikbud.
- Pusat Penilaian Pendidikan. (2018). *Pendidikan di Indonesia: Belajar dari PISA 2018*. Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang Kemendikbud.
- Sandra Kurniawati, Daniel Suryadarma, Luhur Bima and Asri Yusrina. (2018). “Education in Indonesia: A White Elephant?” *Journal of Southeast Asian Economies*, Vol. 35, No. 2, Special Issue: The Indonesian Economy in Transition: Policy Challenges in the Jokowi Era and Beyond (August 2018), pp. 185-199
- Solihin, Lukman, Bakti Utama, Indah Pratiwi, Novirina. (2019). *Indeks Aktivitas Literasi Membaca 34 Provinsi*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan.
- Stanovich, K. (1986). “Matthew Effects in Reading: Some Consequences of Individual Differences in the Acquisition of Literacy”. *Reading Research Quarterly*. 11 (4).
- Strickland, Dorothy S. 2004. “The Role of Literacy in Early Childhood Education” in *The Reading Teacher* 58(1):86-100, September 2004.
- Teale, William H, Whittingham, Collen E, Hoffman, Emily Brown, 2018. “Early Literacy Research, 2006-2015: A Decade of Measured Progress” in *Journal of Early Childhood Literacy*, March 2018.
- UNESCO. 2018. “Emergent Literacy in Early Childhood Education”. Diakses pada 12 Februari 2020 dari http://www.unesco.org/education/pdf/21_33.pdf
- World Bank. 2018a. *World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise* (WDR 2018). Washington, DC: World Bank.
- . 2018b. *Tumbuh Lebih Cerdas: Pembelajaran dan Pembangunan Merata di Asia Timur dan Pasifik*. Washington, DC: World Bank.
- . 2018c. *Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia: Pendidikan untuk Pertumbuhan*. Washington, DC: World Bank.

<http://jmi.ipusk.lipi.go.id>

